

KOMITMEN JERMAN DALAM IMPLEMENTASI EUROPEAN CLIMATE CHANGE PROGRAMME PASCA CONFERENCE OF PARTIES (COP) 15 , UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC), DI COPENHAGEN, DENMARK, 7-18 DESEMBER 2009

Oleh : Lusia Dewi Kharismawardani dan Asep Kamaluddin Nashir

Abstract

This article discusses about the commitment of Germany as one of the advanced industrial countries in the world who have a great responsibility in the magnitude of the resulting emission rates, given the emissions from the industrial sector is one factor that contributes to cause a climate change committed. Previously, industrialized nations has been discussed meeting in Copenhagen who talk again of the magnitude of the emission rate will be reduced and also the fast-start program financing as an obligation of industrialized countries in helping developing countries in mitigation and adaptation efforts related to existing climate change impacts. Commitments undertaken German views of foreign policy its domestic policy to interpret environmental issues based on guidelines created within the European level, the European Climate Change Programme. This thesis also discussed the importance of sustainable development programs as a supporting element which is the basis of all existing environmental policy in Europe.

Keyword : Environmental issue, Climate change, Copenhagen, ECCP, Germany

I. PENDAHULUAN

Degradasi lingkungan menjadi dasar dari meluasnya segala permasalahan lingkungan yang menjadi permasalahan global. Terjadinya degradasi lingkungan dikarenakan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Hal ini sebelumnya telah diargumentasikan oleh *Club of Rome* lewat hasil penelitiannya yang berjudul *Limits To Growth* (1972), tulisan ini berisi pesan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan secara berkelanjutan karena ketersediaan sumber daya alam yang cukup terbatas, sumber daya alam yang dimaksud secara spesifik adalah segala hasil bumi termasuk minyak.¹

Konsumsi hasil alam yang berlebihan pun saat ini telah banyak memberikan dampak yang sangat merugikan dan telah dirasakan oleh seluruh warga dunia. Penyumbang emisi terbesar berasal dari sektor industri, dimana sektor ini banyak menggunakan hasil-hasil alam yang pada akhirnya menghasilkan limbah industri berbahaya bagi lingkungan. Meskipun berbahaya bagi lingkungan namun saat ini sektor industri telah menjadi kebutuhan masyarakat dunia. Limbah dan emisi yang timbul dari adanya proses industri berdampak pada degradasi lingkungan, dan salah satu dampak yang timbul adalah terjadinya pemanasan global.

¹ Antje Brown & Gabriella Kutting dalam Chapter 11 the environment , buku *Issues in internatonal relation* : Second Edition Edited by : Trevor C. Salmon & Mark F. Imber. , hal 155

Pemanasan global sendiri disebabkan karena adanya efek rumah kaca yang disebabkan oleh adanya emisi gas-gas karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrioksida (N₂O) dan CFC menyebabkan bertambahnya jumlah gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi sehingga energi panas yang seharusnya dipantulkan kembali ke bumi menyebabkan temperatur yang panas di permukaan bumi sehingga terjadilah perubahan iklim.² Berbagai dampak dari adanya pemanasan global pun telah memperlihatkan keadaan yang serius, seperti melelehnya es kutub, kenaikan permukaan air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan curah hujan, mulai punahnya beberapa jenis flora dan fauna, serta perubahan iklim.³

Perubahan iklim yang terjadi pada akhirnya memberikan tanggung jawab yang cukup besar bagi negara-negara maju yang menjadikan sektor industri sebagai sektor utama dalam penyokong keberlangsungan ekonominya. Kawasan Eropa merupakan kawasan yang menjadi salah satu basis industri besar di dunia yang tentunya menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi. Pengembangan teknologi itu pun tidak terlepas dari penggunaan energi dan sumber daya alam yang ada, hal ini menyebabkan kawasan Eropa harus berperan dalam penanggulangan akibat dari perubahan iklim secara efektif. Tercatat pada tahun 2005 masing-masing individu menghasilkan emisi GRK rata-rata 10,5%.⁴

Salah satu Negara yang memiliki kontribusi yang cukup penting sebagai negara yang menyumbang peran sebagai pusat pengembangan teknologi dan industri di kawasan Eropa, yaitu Jerman. Jerman tergolong negara industri yang paling maju perkembangannya di dunia dan merupakan perekonomian nasional terbesar ke-3 setelah Amerika dan Jepang dengan jumlah penduduk yang mencapai 82,3 juta jiwa.⁵

Jerman adalah negara pengekspor barang terbesar di dunia dan mendapat julukan "juara dunia ekspor". Cabang-cabang industri terpenting di Jerman ialah industri mobil, elektroteknik, konstruksi mesin dan industri kimia. Latar belakang ini membuat Jerman memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan kontribusinya bagi pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup dan iklim bumi yang saat ini menjadi tantangan global telah disadari sepenuhnya oleh kalangan politik, media dan masyarakat umum Jerman. Dibuktikan bahwa sejak tahun 1990, Jerman telah mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak hampir 20%. Indeks perlindungan Iklim global 2008 terbitan organisasi pelestarian lingkungan *Germanwatch* yang independen menempatkan Jerman pada peringkat kedua.⁶

Pada tingkat internasional, Jerman menjadi pelopor perlindungan iklim dan sebagai perintis pengembangan energi terbarukan. Dalam forum antar negara pun, pemerintah Jerman aktif mendukung pelestarian lingkungan dan strategi pembangunan yang ramah iklim serta kerjasama dibidang energi. Saat ini peran dan posisi Jerman dalam diplomasi perubahan iklim didasari oleh kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah diambil dalam lingkup domestik dan regional dalam hal ini *European Climate Change Programme* (ECCP) pada tingkat internasional yaitu *United Nation Framework on Climate Change* (UNFCCC).

Dengan prioritas pelestarian lingkungan dan energi yang selalu digaungkan, Jerman pun akan banyak melakukan usaha-usaha dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Dapat diperkirakan salah satu usahanya adalah dengan mengurangi angka produksi dari industri-industri yang berlangsung di

2 Artikel "Isu Lingkungan Hidup : Konsep dan Sejarah Perkembangan dalam Hubungan Internasional". Diakses dari <http://geo.ugm.ac.id/archives/28> pada tanggal 1 April 2010 pada pukul 10.47 WIB

3 Berdasarkan data dari WWF Indonesia, tiap tahun diketahui sebanyak 10% - 20% gletser di pegunungan Alpen telah mencair. Kenaikkan permukaan air laut pun juga ditunjukkan dengan angka 9-96 cm.

4 Ibid

5 Thomas Straubhaar. Dalam *Chapter 6 : Germany As a Industry Region* buku *Facts About Germany*. Katalis. 2007. Hal 91-97

6 *Fakta mengenai Jerman*. Editor : Hendarto setiadi. Chapter 7 : Lingkungan Hidup, Iklim, & Energi : Jalan menuju kebijakan iklim dan energi yang modern dan bersinambung. Oleh Joachim Wille. Katalis . Jakarta.2008

negara tersebut sebagai usaha untuk reduksi emisi. Sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa jika industri adalah hal sangat penting bagi kelangsungan kawasan tersebut khususnya dalam hal perekonomian. Dengan kemungkinan tersebut muncul banyak pertanyaan, apakah Jerman sanggup menjalankan komitmen yang ada sesuai dengan apa yang sudah disepakati di ECCP, terlebih sejalan dengan perkembangan diplomasi perubahan iklim, telah muncul banyak instrumen baru yang mengharuskan negara-negara maju untuk lebih memfokuskan diri pada permasalahan ini.

COP-15, UNFCCC, Copenhagen

COP-15, yang diadakan di *Copenhagen*, Denmark merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang akan membahas sebuah agenda dalam menyusun sebuah pedoman baru dalam langkah-langkah penyelamatan bumi atau kesepakatan yang akan menjadi pengganti dari Protokol Kyoto yang akan berakhir masa berlakunya pada 2012 nanti.

Pada akhirnya pertemuan di Copenhagen hanya berhasil mencatat kesepakatan *Copenhagen Accord* yang bersifat *Take Note* dan belum menyelesaikan mandat sesuai dengan *Bali Action Plan* serta *Bali Roadmap*,⁷ Karena statusnya yang tidak mengikat inilah kemudian banyak muncul kesangsian dari negara-negara berkembang akan komitmen yang digaungkan oleh negara-negara maju.

II. PEMBAHASAN

Jerman bersama negara anggota Uni Eropa lainnya menjadi kelompok negara yang memiliki suara yang cukup vokal dalam hal penentuan angka target emisi yang akan dipangkas. Mulai dari target pengurangan emisinya sebesar 15% dalam COP-3 di Kyoto, penstabilan emisi CO₂ di level tahun 1990 pada tahun 2000, usulan pengurangan emisi sebesar 40% pada COP-13 di Bali, dan yang terakhir sesuai ketentuan target pada *Copenhagen Accord* yang mengharuskan negara-negara Uni Eropa untuk mengurangi emisi CO₂ nya sebesar 20% hingga 2020.

Tentunya langkah yang diambil Jerman pada COP 15, tidak akan jauh dari apa yang disepakati pada lingkup domestik kawasannya, dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan pada tingkat internasional merupakan implementasi dari komponen domestik yang ada. Tulisan ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi Jerman dalam komitmennya pada isu perubahan iklim yang sesuai dengan kebijakan regional dalam lingkup Uni Eropa.

Kebijakan lingkungan hidup dalam Uni Eropa telah berkembang pesat sejak 1970-an sebagai suatu dampak positif dari terbentuknya integrasi yang membawa peningkatan terkait dengan dampak kegiatan industri dan pertanian yang meliputi permasalahan polusi, limbah, dan pelestarian lingkungan. Awal mula dari perkembangan kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa, juga dimulai dari adanya kesadaran akan kerusakan lingkungan hidup yang semakin kompleks yang meluas pada komunitas dunia bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi sebuah *international concern* sehingga setiap aktor dalam hubungan internasional berhak untuk terlibat dalam isu ini. Namun semakin intensifnya kinerja ekonomi global dengan paradigma kapitalis dan pasar bebasnya, hal ini cenderung membawa keterkaitan yang lebih pada kepentingan dalam pengambilan kebijakan lingkungan tersebut.⁸

7 Laporan Delegasi RI untuk PBB di New York Tahun 2009. Kementerian Luar Negeri RI

8 Andrew Hurrell dalam "*International Political Theory & The Global Environment*". oleh Ken Booth & Steve Smith. "*International Relation Today*". The Pennsylvania University. Press. Pennsylvania. 1995. hal 136-137

Pembahasan isu lingkungan hidup pada level Eropa dimulai dari rencana *European Sustainable Development Strategy* yang menjadi pedoman Uni Eropa dalam membuat berbagai kebijakan yang berlaku, termasuk *European Climate Change Programme* yang merupakan *guideline* negara-negara anggota Uni Eropa dalam merespon dampak terjadinya perubahan iklim.

Sebagai dasar UE dalam membuat mekanisme solusi pada permasalahan perubahan iklim, pemberlakuan *Sustainable Development Strategy* UE ini juga merupakan salah satu *faktor eksternal* pertama yang mendukung Jerman dalam komitmennya pada isu lingkungan hidup khususnya pada permasalahan perubahan iklim.

III. FAKTOR EKSTERNAL

European Sustainable Development Strategy

Konsep pembangunan berkelanjutan timbul dan berkembang karena timbulnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup. Kesadaran tersebut muncul karena pemanfaatan potensi lingkungan hidup atau sumber daya alam saat ini telah menjadi suatu hal yang merugikan meskipun disatu sisi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini juga menjadi sebuah tantangan besar bagaimana program pembangunan berkelanjutan juga harus dapat menstabilkan angka populasi dunia yang berkaitan erat dengan angka kemiskinan dengan menggunakan *power* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.⁹ Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan mengubah cara pandang menjadi berwawasan lingkungan hidup melalui program pembangunan berkelanjutan serta kebijakan yang kuat dari para pengambil keputusan.

Sejak tahun 1997, SDS telah menjadi salah satu hal fundamental bagi Uni Eropa seperti *Amsterdam Treaty* yang harus direalisasikan.¹⁰ SDS ini ditujukan untuk memberikan langkah adaptasi yang signifikan pada isu lingkungan hidup, misalnya pelaksanaan program untuk mengurangi angka konsumsi energi yang cukup tinggi pada sektor transportasi dan program dalam tujuan untuk meminimalisasikan segala kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Sama dengan definisi pembangunan berkelanjutan secara umum, pembangunan berkelanjutan versi Uni Eropa berisi perpaduan visi jangka panjang yang melibatkan kombinasi dinamis antara pembangunan ekonomi dan kekuatan sektor sosial dengan langkah-langkah yang berwawasan penuh terhadap sektor lingkungan hidup. Pencapaian pada SDS nantinya juga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif produk-produk Eropa.

SDS Uni Eropa telah mengalami perubahan dari pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 hingga yang terakhir pada tahun 2009 adalah merupakan hasil tinjauan kembali komisi Eropa sejalan dengan perkembangan isu lingkungan yang telah meluas ke berbagai sektor.

Secara khusus sosialisasi mengenai SDS yang pertama pada pertemuan di Gothenburg pada tanggal 15 Mei 2001 yang menghasilkan proposal '*A Sustainable Europe for a Better World: A EU Strategy for Sustainable Development*' dan yang kedua pada saat peninjauan kembali SDS pada tanggal 13 Desember 2005.¹¹

9 Artikel "*10 Ideas That Are Changing The World*" oleh Jeffrey D. Sachs. TIME, 24 Maret 2008

10 Diakses dari "*Economy & Environment*" <http://ec.europa.eu/environment/enveco/index.htm> pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 10.35

11 Artikel "*Startegy for Sustainable Development*" http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/128117_en.htm pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 13.32 WIB

Dalam laporan perkembangan SDS Uni Eropa pada tahun 2007 telah ditetapkan 7 prioritas utama dalam kebijakan pembangunan yang harus diimplementasikan UE hingga periode 2010 dimana ke-7 prioritas tersebut didominasi oleh sektor lingkungan, ke-7 prioritas utama tersebut antara lain :¹²

1. Perubahan Iklim dan energi
2. Transportasi yang ramah lingkungan
3. Konsumsi dan produksi
4. Manajemen dan konservasi sumber daya alam
5. Kesehatan masyarakat
6. Bidang Sosial seperti, masalah kependudukan dan migrasi
7. Kemiskinan global dan tantangan pembangunan berkelanjutan lainnya

Dengan 7 prioritas utama tersebut diatas, menunjukkan bahwa SDS tidak hanya selalu berbicara mengenai kebijakan tetapi dapat digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat Eropa untuk melaksanakan program yang ada dalam pencapaian *sustainable development*.

Pada tahun 2010 dikenal juga salah satu program UE dalam mewujudkan SDS, yaitu '*Environment 2010: our future, our choice*'. Program ini sudah dibuat sejak tahun 2001 dengan target pencapaian pada tahun 2010. Program ini antara lain bertujuan untuk melindungi kekayaan sumber daya alam termasuk flora dan fauna, melakukan upaya mitigasi dalam meredam dampak perubahan iklim, mewujudkan kualitas lingkungan dan kesehatan yang baik, dan mengelola dengan baik dan efisien semua hasil alam.¹³

Berkaitan dengan SDS Uni Eropa, terdapat program yang telah berlangsung sebagai bentuk implementasi SDS Uni Eropa, Green Public Procurement (GPP). GPP didefinisikan sebagai sebuah proses dimana masyarakat memperoleh kebutuhan terhadap barang dan jasa serta bekerja dengan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.¹⁴ Terdapat 2 program yang dijalankan untuk mendukung terwujudnya GPP, yaitu *The European Ecolabel* dan *Environment Technologies Action Plan* (ETAP).

European Climate Change Programme

Uni Eropa adalah suatu entitas politik yang unik yang memadukan konsep supranasionalisme dan intergovernmentalisme dalam bentuknya. Perpaduan kedua konsep ini dapat terlihat dari mekanisme kebijakan Uni Eropa dalam masalah pemanasan global. Mekanisme ini terdiri dari keberadaan dan proses pembuatan kebijakan yang dilandasi oleh hukum di tingkat Uni Eropa, instrumen-instrumen pelaksana dari mekanisme tersebut. Dalam isu lingkungan hidup Uni Eropa memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan yang berlandaskan hukum di tingkat Uni Eropa. Kebijakan tersebut kemudian dijalankan melalui program-program dalam sektor-sektor yang terkait di Uni Eropa, dan kemudian implementasi akhir berada di tangan negara-negara anggota sebagai pelaksana.

Pada tingkat global Uni Eropa banyak memberikan usulan yang lebih berorientasi jangka panjang dengan mempromosikan penggunaan listrik secara efisien, mereduksi emisi CO₂ dari sektor transportasi sebesar 25% hingga usulan untuk memberikan pajak yang signifikan untuk produk-produk energi. Usulan-usulan tersebut disadari oleh *EU Council of Environment Minister* bahwa dibutuhkan tindakan dengan membuat sebuah pedoman yang dapat digunakan untuk menanggulangi dampak

12 Artikel "*Sustainable Development*" <http://ec.europa.eu/environment/eussd/> pada tanggal 30 Juni 2011 pukul 11.47 WIB

13 Pascal Fontaine dalam "*Europe in 12 Lesson*". EU Publication Office.Luxembourg.2006 h. 25

14 Artikel "*Green Public Procurement*" http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm pada tanggal 28 Juni 2011 pukul 10.34 WIB

perubahan iklim, salah satu program implementasi dari kebijakan lingkungan yang dibuat dan telah dijalankan dalam level Uni Eropa adalah *European Climate Change Programme* (ECCP) yang mulai diperkenalkan pada Juni 2000, dengan tujuan akhir untuk mengidentifikasi dan membangun semua elemen yang menjadi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan Protokol Kyoto.

ECCP dibuat pada tahun 2000 untuk membantu dalam pengidentifikasian langkah-langkah efektif yang harus dilaksanakan berkaitan dengan kebijakan lingkungan serta memastikan bahwa semua langkah dilakukan tepat pada level Eropa sebagai langkah untuk memangkas emisi gas rumah kaca yang dikelola secara langsung oleh komisi Eropa. Tujuan utama dari ECCP adalah untuk membantu memastikan bahwa UE dapat mencapai target reduksi emisi yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Protokol Kyoto yang mewajibkan seluruh negara anggota uni Eropa harus mengurangi emisinya sebesar 8% sebelum 2004, target yang lebih sedikit dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 1990.¹⁵

ECCP terbagi dalam 2 periodisasi, ECCP pertama (2000-2004) lebih menekankan pada penyatuan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari para pengambil keputusan, perwakilan setiap departemen dari komisi Eropa, perwakilan negara anggota, kalangan bisnis hingga kelompok-kelompok yang memiliki fokus dalam isu lingkungan.

Hingga saat ini terdapat 40 kebijakan yang ada dalam kerangka ECCP yang secara umum membahas mengenai mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca, diantaranya mengenai reduksi emisi gas rumah kaca, penetapan standar penggunaan energi, regulasi penggunaan gas pada sektor industri, yang memiliki dampak yang cukup besar bagi pemanasan global yang terjadi.

Sejauh ini pembahasan terpenting yang terdapat pada ECCP adalah pembahasan mengenai mekanisme *Emission Trading Scheme* (2005). Skema ini adalah mekanisme pertama di tingkat internasional yang membahas mengenai sistem perdagangan karbon dan menjadi pedoman utama dalam usaha mempercepat sistem perdagangan karbon di dunia sebagai tindak lanjut dari fenomena pemanasan global. Skema perdagangan Karbon UE ini telah melingkupi 10.500 instalasi pada sektor energi dan industri yang secara kolektif bertanggung jawab terhadap setengah dari emisi CO₂ yang ada di Eropa.¹⁶

IV. FAKTOR INTERNAL

Evolusi Kebijakan Jerman dalam Isu Lingkungan Hidup

Dalam membuat kebijakannya, pemerintah Federal menggunakan 3 prinsip dasar yang digunakan, yaitu:¹⁷

1. Prinsip pencegahan, semua program dan kebijakan yang dibuat adalah sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang memicu adanya polusi dan kerusakan lingkungan,
2. Prinsip sanksi, prinsip ini menjelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pencemaran lingkungan memiliki tanggung jawab penuh dalam usaha memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada.
3. Prinsip kerjasama, dalam kebijakan yang dibuat menegaskan bahwa harus ada kerjasama antara pemerintah, para pelaku industri, dan seluruh masyarakat untuk secara aktif mencari solusi terbaik dari permasalahan lingkungan yang ada. Hal ini juga secara langsung menjelaskan bahwa setiap pribadi pun memiliki tugas terhadap usaha pelestarian lingkungan.

¹⁵ "European Climate Change Programme – First". diakses dari http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/first_en.htm pada tanggal 11 April 2011 pada pukul 23.33 WIB

¹⁶ "Combating Climate Change: EU Leads The Way". EU Publication Office. Luxembourg. 2007. Hal.12

¹⁷ Diambil dari buku "Facts About Germany", edited by: Dr. Arno Kappler. Societats-Verlag. Frankfurt. 1995 Hal. 255

Implementasi dari ketiga prinsip diatas dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan program yang dibuat oleh setiap Kanselir pada periodenya masing-masing terkait isu lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1 : Perkembangan kebijakan Jerman pada Isu perubahan iklim

Periode	Kanselir	Kebijakan Lingkungan Hidup
1969 – 1974	Willy Brandt (Kanselir pertama yang memiliki prioritas tinggi dalam isu lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye “Blue Skies Over District” - Pembentukan Federal Environment Programme (Oktober 1971) - Pembentukan The Council of Environment Experts (1972) - Pembentukan The Federal Environment Office (1974)
1974-1982	Helmut Schmidt	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan penggunaan energi secara lebih efisien agar tercipta kestabilan ekonomi - Dasar dari pembuatan undang -undang energi terbarukan
1982 – 1998	Helmut Kohl	<ul style="list-style-type: none"> - Penobatan Joschka Fischer sebagai Green State Minister for environmental and e nergy affairs - Inovasi pembuatan teknologi nuklir yang lebih aman sebagai reaksi atas terjadinya tragedi Chernobyl dengan membentuk Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) - Pemberlakuan Federal Emission Act
1998 – 2005	Gerhard Schroder	<ul style="list-style-type: none"> - memprioritaskan p engembangan inovasi teknologi yang ramah lingkungan - Pengusulan climate change protetion programme oleh BMU
2005 – sekarang	Angela Merkel	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran pemerintah federal dalam memenuhi target pengurangan emisi dengan lebih serius dan komprehensif - Pengembangan sektor energi terbarukan

Jerman dalam Implementasi ECCP Pasca COP-15, UNFCCC di Copenhagen, Denmark

Jerman memiliki program dan kebijakannya sendiri terkait dengan kepentingan nasional ataupun ideologi yang dianut, tetapi juga mengikuti pedoman negara-negara Eropa dalam isu perubahan iklim, yaitu, ECCP. Pemerintah Jerman secara aktif berusaha menjadi pemimpin dalam diplomasi perubahan iklim. Saat pertemuan di Copenhagen, Jerman menunjukkan target ambisius dengan memberikan usulan-usulan sesuai dengan pencapaian domestiknya termasuk target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 40% di tahun 2020 sesuai dengan level tahun 1990.

Berdasarkan *Copenhagen Accord* , Jerman juga menyadari pentingnya bantuan negara-negara industri maju kepada negara-negara berkembang dalam hal *financial aid* bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang.

Tabel 2 : Kontribusi Jerman dalam Program Fast Start Financing 2010

Mitigation	Adaptation	REDD+
Clean technology fund : 125 milion euros	Pilot program for climate change Resilience : 9 milion euros	• Forest carbon partnership facility : 20 milion euros
UNDP – MRV : 5 milion euros	Adaptation fund : 10 milion euros	• Bilateral projects : 47 milion euros
Bilateral Projects : 67 milion euros	UNEP/UNDP ecosystem based Adaptation flagship : 10 milion euros (under preparation)	
	Bilateral projects : 53 milion euros	
Total : 197 milion euros	Total : 83 milion euros	Total : 77 milion euros

Selain dalam bentuk climate financing, Jerman juga melakukan berbagai usaha dalam mengurangi angka reduksi emisi, antara lain dengan :

- **Membuat kebijakan yang berorientasi lingkungan**, salah satunya dengan membuat Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Tujuan EEG adalah memberikan kesempatan jenis energi terbarukan dalam pemakaian listrik meningkat sebesar 14,3% menjadi sampai 25 hingga 30 % pada tahun 2020.
- **Mengembangkan teknologi dengan meningkatkannya efisiensi energi pada setiap inovasi yang dibuat**, dengan adanya teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), yaitu pemisahan dan penyimpanan karbondioksida yang terjadi dalam proses pembangkit listrik. Ada 3 sasaran pokok yang dituju oleh pemerintah Federal dengan program pelestarian iklim, terjaminnya pengadaan dan distribusi energi, sifat ekonomis, dan sifat ramah lingkungan. Sampai tahun 2020, efisiensi energi terbarukan tersebut akan dinaikkan mencapai 25 hingga 30 %.
- **Memperluas Cakupan Emission Trading System (ETS)**, awal 2011 ini pemerintah Jerman telah berhasil mengamandemen *Greenhouse Gas Emissions Trading Act* yang melingkupi sektor penerbangan dan sektor penghasil emisi lain yang menyumbang banyak.
- **Mengatur angka polusi dari sektor transportasi**, mengembangkan dan mempromosikan teknologi inovatif pada sektor transportasi serta mensosialisasikan manajemen modern terhadap polusi. Dalam hal ini Jerman menggunakan pedoman yang dibuat dalam level Eropa yang tertera di ECCP dan secara khusus disepakatinya *agreement on light commercial vehicles* pada tahun 2010. Kesepakatan ini berisi ketentuan terkait kendaraan bermotor yang harus mengurangi rata-rata 27% dari 147 gram CO₂ yang dihasilkan setiap 1 Km, Diatur pula dalam kesepakatan ini target sementara dengan presentase yang sama untuk 175 gram CO₂ setiap 1 Km pada tahun 2017.¹⁸

18 Artikel "*Federal Environment Minister welcomes agreement on light commercial vehicles*" yang diakses dari http://www.bmu.de/english/current_press_releases/pm/46753.php pada 14 Juli 2011 Pukul 21.39 WIB

V. KESIMPULAN

Jerman sebagai salah satu negara industri maju memperlihatkan komitmennya dalam upaya realisasi *Copenhagen Accord* meskipun perjanjian tersebut tidak memiliki status *legally binding*. Keberhasilan Jerman dalam komitmennya pada diplomasi perubahan iklim ini tidak lepas dari pedoman yang digunakan Jerman yang berlaku pada level Eropa, yaitu *European Climate Change Programme* (ECCP). Dengan adanya ECCP, UE telah sukses menggabungkan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilihat dari fakta meningkatnya pertumbuhan ekonomi Eropa antara tahun 1990 sampai tahun 2005 dan rata-rata pengurangan emisi gas rumah kaca dari 27 negara anggota UE sebesar 7,9%. Pencapaian ini cukup mengesankan tetapi tetap saja target yang harus dicapai sebesar 8% ditahun 2012 pada level tahun 1990.

Keberhasilan Jerman dalam memperlihatkan komitmennya pasca COP 15 juga bersamaan keberhasilannya menjadi salah satu basis industri dan teknologi di dunia yang memiliki prioritas kepada kelestarian lingkungan hidup, selain itu Jerman juga sering disebut sebagai *leader state* UE dalam mendorong masuknya isu lingkungan hidup sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan di Eropa. Berbagai predikat tersebut didapatkan Jerman dilatarbelakangi oleh 2 faktor, internal dan Eksternal sehingga komitmen Jerman dianggap cukup tinggi terkait perannya pada isu perubahan iklim pada diplomasi perubahan iklim di tingkat global.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Booth, Ken dan Steve Smith. 1995. *International Relation Today*. Pennsylvania: The Pennsylvania University Press.

Setiadi, Hendarto (editor). 2008. *Fakta mengenai Jerman*. Jakarta: Katalis.

Fontaine, Pascal. 2006. *Europe in 12 lessons*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Publication Office. 2007. *Combating Climate Change : European Leads The Way*. Luxembourg.

Salmon, Trevor C dan Mark F. Imber. 2000. *Issues in internatonal relation*. London: Routledge.

Kappler, Arno (editor). 1995. *Facts About Germany*. Frankfurt: Societats-Verlag.

Artikel

Artikel "10 Ideas That Are Changing The World" oleh Jeffrey D. Sachs. TIME , 24 Maret 2008

Dokumen Resmi

Laporan Delegasi RI untuk PBB di New York Tahun 2009. Kementerian Luar Negeri RI

Website

"Isu Lingkungan Hidup : Konsep dan Sejarah Perkembangan dalam Hubungan Internasional".
<http://geo.ugm.ac.id/archives/28>

"Economy & Environment" <http://ec.europa.eu/environment/enveco/index.htm>

"Startegy for Sustainable Development"

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28117_en.htm

"Sustainable Development" <http://ec.europa.eu/environment/eussd/>

"European Climate Change Programme – First".

http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/first_en.htm

"Federal Environment Minister welcomes agreement on light commercial vehicles"

http://www.bmu.de/english/current_press_releases/pm/46753.php